

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang Relevan yang digunakan sebagai acuan dan pembanding adalah :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No | Nama, Tahun, Judul Penelitian | Variabel | Metodologi Penelitian | Hasil |
|----|---|---|-----------------------|--|
| 1 | Dolli Paulina Surupati, 2013, Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian intern atas penjualan dan penagihan piutang pada PT. Laris Manis Utama Cabang Manado | Sistem Pengendalian Intern Penjualan dan Penagihan Piutang | Kualitatif | <p>1 Unsur-unsur pengendalian intern atas penjualan belum efektif. Belum terdapat fungsi kredit dalam melakukan penjualan kredit. Dalam pemberian kredit kepada customer tidak dilakukan survey, Tidak ada otorisasi atas pemberian kredit dan faktur penjualan tunai dari pejabat yang berwenang.</p> <p>2 Unsur-unsur pengendalian intern atas penagihan piutang pada umumnya sudah efektif hal ini dapat di lihat dari adanya pemisahan fungsi antara fungsi piutang.</p> |

| | | | | |
|---|--|---|------------|---|
| 2 | Nabila Habibie, Jurnal EMBA Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal. 494- 502, Analisis Pengendalian Intern Piutang Usaha Pada PT. Adira Finance Cabang Manado | Pengendalian Internal Piutang Usaha | Kualitatif | <ol style="list-style-type: none"> 1 Lingkungan pengendalian terhadap piutang usaha pada PT. Adira manado sudah berjalan efektif, hal iniditandai salah satunya dengan penerapan SOP (standard operating procedures) pada divisi collection 2 Informasi dan komunikasi mengenai piutang usaha telah diterapkan secara efektif, baik informasi yang disampaikan oleh manajemen kepada bawahannya maupun informasi yang berasal dari karyawan kepada manajemen. |
| 3 | Christian Richo Singal1 Victorina Z. Tirayoh2, Jurnal EMBA 286 Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal. 286-296, Analisis Pengendalian Internal Piutang Usaha pada Developer Grand Kawanua Internasional City | Pengendalian Internal Piutang Usaha | Kualitatif | Pengendalian intern piutang usaha berjalan dengan baik. Perusahaan memiliki SOP yang sangat jelas dan terarah. Selain itu perusahaan juga ditunjang dengan karyawan yang kompeten sehingga tidak pernah terdapat kesalahan yang signifikan pada pencatatan piutang. Selain itu penagihan juga berjalan dengan lancar terbukti dari kecilnya bad debt perusahaan. |

| | | | | |
|---|--|--|------------|--|
| 4 | Novi Arie Kardiyanti, Ali Rasyidi, Siti Rosyafah, Jurnal Ekonomi Akuntansi Vol. 3. Issue. 3 (2017), Penerapan Pengendalian Intern Penjualan Kredit dalam Upaya Meminimalisir Piutang Tidak Tertagih Pada PT. Supralita Mandiri Cabang Sidoarjo | Pengendalian Internal Penjualan Kredit Piutang tak Tertagih | Kualitatif | <ol style="list-style-type: none"> 1 Prosedur pengendalian intern penjualan kredit belum berjalan memadai karena ada beberapa unsur yang belum diterapkan seperti masih adanya perangkapan fungsi penjualan dan penagihan, sehingga menyebabkan peluang terjadinya kecurangan cukup tinggi. 2 Tidak adanya fungsi kredit khusus yang hanya menangani penjualan kredit diantaranya otorisasi pemberian dan penjualan kredit. 3 Faktor-faktor penjualan kredit seperti penentuan standar, plafon, dan pemberian volume kredit belum diterapkan secara sempurna sehingga resiko piutang tidak tertagih masih relatif tinggi. |
| 5 | 1Jhon Peris Simanjuntak, 2Sri Rahayu, 3Muhamad Muslih, e-Proceeding of Management : Vol.4, No.1 April 2017, Sistem Informasi Akuntansi dalam | Sistem Informasi Akuntansi Pengendalian Internal Penjualan dan Piutang | Kualitatif | <ol style="list-style-type: none"> 1 Pelaksanaan sistem informasi akuntansi di PT Pos Indonesia (Persero) Regional V telah berjalan dengan baik. 2 Pelaksanaan Pengendalian Internal Penjualan di PT Pos Indonesia (Persero) Regional V juga telah berjalan dengan baik. |

| | | | | |
|----|---|--|------------|---|
| | mendukung Efektivitas Pengendalian Internal Penjualan dan Pengendalian Internal Piutang | | | <p>3 Pelaksanaan pengendalian internal piutang di PT Pos Indonesia (Persero) Regional V juga telah berjalan dengan baik.</p> <p>4 Sistem Informasi Akuntansi memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian internal penjualan PT Pos Indonesia (Persero) Regional V.</p> |
| 6. | Orhan Akisik, GRAHAM GAL, (2017) Management and Policy Journal, Vol. 8 Issue: 3, Sustainability Accounting, Management and Policy | <p>Policy Accounting Management</p> <p>Accounting Management</p> | Qualitatif | <p>1 The results indicate that the impacts of customers and employees on financial performance are influenced by third party reviewed corporate social responsibility reports and effective internal control. Moreover, we find that the third party reviewed corporate social responsibility reports and effective internal control enable the persistence of ncial performance.</p> |

Tabel di atas mendeskripsikan beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan antara peneliti ini dengan peneliti sebelumnya. Persamaan peneliti ini dan peneliti terdahulu terletak pada variabel dan metode penelitian. Variabel dan metode penelitian ini adalah sistem pengendalian internal dan piutang usaha menggunakan metode kualitatif, sedangkan untuk penelitian terdahulu variabel dan metode penelitian yang

digunakan pada penelitian pertama yaitu Dolli Paulina Surupati menggunakan variabel Sistem Pengendalian Internal menggunakan metode kualitatif, penelitian kedua yaitu Nabila Habibie menggunakan variabel pengendalian internal dan piutang usaha dengan metode kualitatif, penelitian ketiga yaitu Christian richo menggunakan variabel pengendalian internal dan piutang usaha dengan metode kualitatif, penelitian keempat yaitu Novie arie kardiyanti menggunakan variabel pengendalian internal dengan metode kualitatif, penelitian kelima yaitu Jhon peris simanjutak menggunakan variabel pengendalian internal dan piutang usaha dengan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan antara peneliti ini dan peneliti terdahulu terletak pada Objek dan Tahun yang digunakan. Objek dan tahun yang digunakan dalam penelitian ini adalah di PT. Samudera Gemilang Plastindo Jombang tahun 2020, sedangkan untuk penelitian terdahulu objek dan tahun yang digunakan pada penelitian pertama yaitu Dolli Paulina Surupati melakukan penelitian di PT. Laris Manis Utama Cabang Manado tahun 2013, Penelitian Kedua oleh Nabila Habibie yang meneliti di PT. Adira Finance Cabang Manado tahun 2013, Peneliti ketiga oleh Christian Richo Singal yang meneliti di Developer Grand Kawanua Internasional City tahun 2015, peneliti keempat yaitu oleh Novie Arie Kardiyanti di PT. Supralina Mandiri Cabang Sidoarjo tahun 2017, peneliti kelima yaitu oleh Jhon Peris Simanjutak di PT POS Indonesia (Persero) tahun 2017.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Evaluasi

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang dikutip oleh Kresna Teta Wijaya (2016:12) evaluasi adalah proses atau upaya penilaiandan pengukuran efektivitas dan evaluasi ini juga dapat memberikan informasi yang berguna bagi para pengambil keputusan dalam menentukan alternative keputusan untuk menentukan strategi apakah yang pantas digunakan.

Evaluasi mengandung pengertian suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Hal ini didukung dengan asal kata evaluasi itu sendiri Evaluasi berasal dari kata bahasa Inggris yitu *evaluation* yang memiliki arti penilaian atau penaksiran. Kata evaluasi biasanya digunakan untuk menilai sesuatu yang telah terjadi atau diberlakukan sebelumnya. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan tentang definisi evaluasi yaitu suatu penilaian terhadap suatu objek tertentu. (Idhofi, 2017)

Jadi berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses untuk menilai dan mengukur dari suatu hal yang dapat memberikan informasi untuk penentuan keputusan.

2.2.2 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian Internal (*internal Control*) adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga asset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong ketidaksesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan (Peris Simanjuntak & Rahayu, 2017).

Menurut (Mulyadi, 2017) pengendalian internal merupakan suatu proses yang mana dijalankan oleh komisaris, manajemen dan personil lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut (Faridayanti, 2017) Pengendalian Internal (*internal Control*) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberikan kepastian yang beralasan terkait dengan pencapaian sasaran kategori sebagai berikut; kendala pelaporan keuangan; dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut (Ariseno Riswanda, 2017) Sistem Pengendalian Internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang direncanakan untuk memberikan kepastian yang layak bagi manajemen bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Manajemen memiliki tiga tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif, yaitu keandalan

pelaporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi, serta ketaatan pada hukum dan pelaporan.

(Singal, Christian Richo, 2015) menyatakan bahwa, Laporan *COSO* mendefinisikan pengendalian intern sebagai salah satu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil satuan usaha lainnya yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal-hal berikut:

1. Keandalan pelaporan keuangan
2. Kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku
3. Efektivitas dan efisiensi operasi

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal merupakan suatu kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan agar kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Konsep-konsep dasar yang terkandung dalam definisi diatas adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian intern adalah suatu proses. Berarti bahwa pengendalian intern merupakan cara untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Pengendalian intern terdiri dari serangkaian tindakan yang melekat dan terintegrasi dalam infrastruktur satuan usaha.
2. Pengendalian intern dipengaruhi oleh manusia. Pengendalian intern bukan hanya terdiri dari serangkaian buku pedoman kebijakan dan formulir-formulir, tetapi juga orang-orang pada berbagai jenjang dalam

suatu organisasi, termasuk dewan komisaris, manajemen, serta personil lainnya.

3. Pengendalian intern hanya diharapkan memberikan keyakinan memadai, bukannya keyakinan penuh bagi manajemen dan dewan komisaris satuan usaha kerana adanya kelemahan-kelemahan bawaan yang melekat pada seluruh sistem pengendalian intern dan perlunya mempertimbangkan biaya dan manfaat yang bersangkutan dengan penetapan pengendalian tersebut.
4. Pengendalian intern adalah alat untuk mencapai tujuan-tujuan dalam berbagai hal yang satu sama lain tumpang tindih yaitu pelaporan keuangan, kesesuaian dan operasi.

2.2.3 Struktur dan Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal

Struktur utama dari pengendalian adalah adanya penetapan kebijakan dan prosedur yang dapat memberikan jaminan kewajiban dalam pencapaian tujuan. Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan diharapkan dapat memberi peranan dalam mengatasi permasalahan yang timbul dalam mencapai tujuan usaha (Vita, 2017).

Pengendalian internal memiliki 3 fungsi yang terdiri dari pencegahan, yang merupakan pencegahan atas kemungkinan timbulnya suatu masalah sebelum masalah tersebut muncul, fungsi pemeriksaan dibutuhkan untuk mengungkapkan masalah ketika masalah tersebut

muncul dan fungsi pengendalian yaitu pemeriksaan yang mencakup pada prosedur identifikasi penyebab, perbaikan dan mengubah sistem agar masalah di masa depan dapat diminimalkan atau dihilangkan. Menurut Mulyadi (2017) supaya dapat berjalan dengan baik, maka suatu sistem pengendalian intern harus memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Prinsip pembagiannya adalah harus di pisahkan fungsi-fungsi operasi, penyimpanan dan fungsi Akutansi. Kemudian suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, pendapatan dan biaya.
3. Sistem otorisasi akan menjamin dokumen pembukuan yang dapat di percaya dan prosedur pencatatan yang baik akan menghasilkan informasi yang di teliti dan dapat di percaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.
4. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit orgaisasi. Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah:
 - a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang.

- b. Pemeriksaan mendadak (*surprised audit*). Pemeriksaan mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa, dengan jadwal yang tidak teratur.
 - c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari pihak lain.
 - d. Perputaran jabatan (*job rotation*).
 - e. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak.
 - f. Secara priodik diadakan pencocokan fisik asset dengan catatannya.
 - g. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian intern yang lain.
5. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya merekrut karyawan yang dapat digaji dengan rendah, ini menimbulkan adanya cara kerja yang salah atau tidak sesuai dengan kemampuannya. Untuk memperoleh karyawan yang baik dapat ditempuh dengan dua cara yaitu seleksi karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya kemudian harus adanya pengembangan pendidikan karyawan selain menjadi karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya.

Menurut (Mulyadi, 2017) Ada lima komponen struktur pengendalian intern yang saling berkaitan yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian

Menurut Lingkungan Pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personel organisasi tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua unsur pengendalian intern, yang membentuk disiplin dan struktur serta mencerminkan sikap dan tindakan para pemilik dan manajer entitas mengenai pentingnya pengendalian intern entitas. Efektifitas informasi dan komunikasi serta aktifitas pengendalian sangat di tentukan oleh atmosfer yang di ciptakan oleh lingkungan pengendalian, seperti terciptanya lingkungan yang nyaman untuk bekerja di dalam lingkungan kantor. Kenyamanan seperti ini yang akan menciptakan suatu lingkungan pengendalian yang efektif dan efisien. karena lingkungan yang efektif dan efisien dapat meningkatkan produktifitas kerja karyawan. Lingkungan pengendalian Merupakan pondasi dari komponen lainnya dan meliputi beberapa faktor diantaranya:

- a. Integritas dan Etika, merupakan produk dari standar etika dan perilaku entitas, bagaimana hal ini dikomunikasikan, dan ditegakkan dalam praktik. Standar tersebut mencakup tindakan manajemen untuk menghilangkan atau mengurangi dorongan dan godaan yang mungkin menyebabkan personel melakukan tindakan tidak jujur, melanggar hukum, atau melanggar etika Standar tersebut juga mencakup komunikasi nilai-nilai dan standar perilaku entitas kepada

- personel melalui pernyataan kebijakan dan kode etik serta dengan contoh nyata
- b. Komitmen untuk meningkatkan kompetensi. Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen atas tingkat kompetensi untuk pekerjaan tertentu dan bagaimana tingkat tersebut ditermahkan ke dalam persyaratan keterampilan dan pengetahuan.
 - c. Dewan komisaris dan komite audit. Atribut yang berkaitan dengan dewan komisaris atau komite audit ini mencakup independensi dewan komisaris atau komite audit dari manajemen, pengalaman dan tingginya pengetahuan anggotanya, luasnya keterlibatan dan kegiatan pengawasan, memadainya tindakan, tingkat sulitnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dewan atau komite tersebut kepada manajemen, dan interaksi dewan atau komite tersebut dengan auditor intern dan ekstern
 - d. Filosofi manajemen dan jenis operasi. Falsafah dan gaya operasi manajemen menjangkau tentang karakteristik yang meliputi antara lain; pendekatan manajemen dalam mengambil dan mamantau risiko usaha; sikap dan tindakan manajemen terhadap pelaporan keuangan dan upaya manajemen untuk mencapai anggaran, laba serta tujuan bidang keuangan dan sasaran operasi lainnya
 - e. Kebijakan dan praktek sumber daya manusia. Struktur organisasi suatu entitas memberikan kerangka kerja menyeluruh bagi perencanaan, pengarahan, dan pengendalian operasi. Selain itu,

struktur organisasi harus menetapkan wewenang dan tanggung jawab dalam entitas dengan cara yang semestinya.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko suatu perusahaan (entitas) berkenaan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Perhitungan risiko oleh manajemen harus mencakup pertimbangan khusus untuk risiko yang bisa muncul akibat perubahan-perubahan yang terjadi, seperti adanya bidang usaha baru dengan transaksi-transaksi yang prosedur akuntansinya belum begitu dipahami, perubahan standar akuntansi, perubahan undang-undang dan peraturan, dan lain-lain. Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan seperti berikut ini:

- a. Perubahan dalam lingkungan operasi. Perubahan dalam lingkungan peraturan dan operasi dapat mengakibatkan perubahan dalam tekanan persaingan dan risiko yang berbeda dapat mengakibatkan perubahan dalam tekanan persaingan dan risiko yang berbeda secara signifikan
- b. Personel baru. Personel baru mungkin memiliki fokus yang berbeda atas atau pemahaman terhadap pengendalian intern.

- c. Sistem informasi baru atau yang diperbaiki. Perubahan signifikan dan cepat dalam sistem informasi dapat mengubah risiko berkaitan dengan pengendalian intern
- d. Pertumbuhan yang pesat. Perluasan operasi yang signifikan dan cepat dapat memberikan tekanan terhadap pengendalian dan meningkatkan risiko kegagalan dalam pengendalian.
- e. Teknologi baru. Pemasangan teknologi baru kedalam operasi atau sistem informasi dapat mengubah risiko yang berhubungan dengan pengendalian intern
- f. Lini produk, produk, atau aktivitas baru. Dengan masuk ke bidang bisnis atau transaksi yang di dalamnya entitas belum memiliki pengalaman dapat mendatangkan risiko baru yang berkaitan dengan pengendalian intern.
- g. Restrukturisasi korporat. Restrukturisasi dapat disertai dengan pengurangan staf dan perubahan dalam supervise dan pemisahan tugas yang dapat mengubah risiko yang berkaitan dengan pengendalian intern
- h. Operasi luar negeri. Perluasan atau pemerolehan operasi luar negeri membawa risiko baru atau seringkali risiko yang unik yang dapat berdampak terhadap pengendalian intern, seperti risiko tambahan atau risiko yang berubah dari transaksi mata uang asing.

- i. Penerbitan standar akuntansi baru. Pemakaian prinsip akuntansi baru, atau perubahan prinsip akuntansi dapat berdampak terhadap risiko dalam penyusutan laporan keuangan.

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan prosedur yang dibuat untuk memberi keyakinan bahwa petunjuk yang di buat oleh manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang di perlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi resiko dalam pencapaian entitas. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai macam tujuan dan di terapkan dalam berbagai tingkat dan fungsi organisasi, aktivitas pengendalian juga meliputi penaksiran risiko yang bertujuan untuk pelaporan keuangan perusahaan yang berguna untuk identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia.

4. Informasi dan Komunikasi

Menurut Sistem informasi yang berhubungan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang mencakup sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan-catatan yang digunakan untuk mengidentifikasi, menggabungkan, menganalisis, menggolongkan, mencatat dan melaporkan transaksi perusahaan (termasuk pula kejadian-kejadian dan kondisi) dan menyelenggarakan pertanggungjawaban atas aktiva

dan kewajiban yang bersangkutan. Komunikasi menyangkut pemberian pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab masing-masing individu berkenaan dengan struktur pengendalian intern atas laporan keuangan.

5. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penetapan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan tindakan perbaikan yang dilakukan. Dalam banyak entitas, auditor intern atau personel yang melaksanakan fungsi semacam itu, membantu untuk melakukan pemantauan atas aktivitas entitas melalui evaluasi secara terpisah.

Efektifitas pengendalian internal biasanya memerlukan kesepakatan penghakiman, karena sifat subjektif dari materi subjek. Untuk membantu perusahaan membuat penilaian ini, serta dapat berguna untuk mempertimbangkan berbagai keandalan Berdasarkan campuran kualitas. Deskripsi salah satu model keandalan tersebut. (RAMOS, 2008)

2.2.4 Pengendalian Internal atas Piutang

Menurut (Arie dan Rasyidi, 2017) didalam sistem pengendalian intern piutang mencakup mengenai prosedur pencatatan piutang sebagai berikut:

a. Fungsi Kredit

Fungsi ini bertanggung jawab atas pemberian kredit kepada pelanggan yang terpilih dan melakukan pengumpulan informasi tentang kemampuan keuangan calon anggota.

b. Fungsi Penjualan

Fungsi ini bertanggungjawab melayani kebutuhan barang pelanggan. Fungsi penjualan mengisi faktur penjualan kredit untuk memungkinkan fungsi gudang dan fungsi pengiriman melaksanakan penyerahan barang kepada pelanggan.

c. Fungsi Akuntansi

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat transaksi bertambahnya piutang kepada pelanggan ke dalam kartu piutang berdasarkan faktur penjualan kredit yang diterima dari fungsi pengiriman.

d. Fungsi Penagihan

Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan penagihan pada debitur perusahaan berdasarkan daftar piutang tak tertagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi.

Setiap perusahaan yang melakukan kebijakan penjualan kredit atau bergerak dibidang pembiayaan sebagian besar asset yang dimiliki adalah berupa piutang. Agar piutang yang dimiliki perusahaan

dapat terlealisasi tanpa adanya penunggakan pembiayaan, perusahaan perlu menetapkan kebijakan piutang yang baik dan tepat. Menurut (Faridayanti, 2017) Wujud dari kebijakan tersebut yaitu dengan adanya pengendalian internal dan pengawasan atas piutang.

1. Penetapan pemberian kredit

Kebijakan pemberian kredit dan syarat pemberian kredit haruslah ditetapkan dengan baik agar tidak merugikan perusahaan dan menghambat para pelanggan yang baik dan potensial. Pada umumnya dalam pemberian kredit berpedoman pada prinsip 5C yang terdiri dari:

a. *Character* (Watak)

Watak dapat diartikan sebagai kepribadian, moral dan kejujuran seseorang, sehingga debitur sulit untuk ditemukan apalagi bila debitur baru pertama kali mengajukan permohonan kredit. Pemberian kredit pada debitur yang memiliki watak tidak baik akanberisiko tinggi terhadap penyimpangan penggunaan kredit dari tujuan yang ditetapkan dalam perjanjian. penyimpangan tersebut dapat mengakibatkan pengembalian kredit tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan sehingga kredit tidak dapat tertagih atau macet.

b. *Capital* (Modal)

Modal diperlukan dalam menjalankan kegiatan usaha baik oleh perorangan maupun badan usaha. Seseorang yang akan mengajukan

kredit permohonan untuk keperluan produktif atau konsumtif harus memiliki modal. Permohonan kredit yang berbentuk badan usaha, besarnya modal yang dimiliki dapat dianalisa dari laporan keuangan. Semakin besar modal yang dimiliki menunjukkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban membayar.

c. *Capacity* (Kemampuan)

Untuk dapat memenuhi kewajiban pembayaran debitur harus memiliki kemampuan cukup yang serasal dari pendapatan. Analisa kemampuan debitur diperlukan untuk mendapatkan informasi secara benar mengenai data penghasilan atau pendapatan, pekerja atau usaha debitur yang mengindikasikan perolehan pendapatan debitur sehingga memberikan keyakinan adanya kemampuan debitur dalam mengembalikan hutangnya.

d. *Collateral* (Jaminan)

Jaminan berarti harta kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna menjamin kepastian pelunasan hutang jika dikemudian hari debitur tidak melunasi hutangnya maka pelunasan hutang dapat dilakukan dengan jalan penjualan harta kekayaan yang menjadi jaminan tersebut.

e. *Condition of economy* (Kondisi Ekonomi)

Kondisi ini adalah situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu dimana kredit tersebut diberikan. Kondisi ekonomi Negara

yang buruk juga mempengaruhi usaha dan pendapatan permohonan kredit yang akibatnya berdampak pada kemampuan pemohon kredit untuk melunasi hutangnya.

2. Penagihan

Pelaksanaan penagihan merupakan upaya tindak lanjut dari kebijakan pemberian kredit dimana telah ditetapkan mengenai syarat-syarat pemberian kredit diantaranya syarat jatuh tempo pembayaran. Perusahaan dapat melakukan pengendalian piutang yang saat jatuh temponya belum melakukan pembayaran dengan dimulai dari cara pengiriman surat tagihan kepada debitur, atau melalui tindakan secara hukum.

3. Penetapan dan pengendalian intern yang tepat

Dalam penetapan pengendalian internal atas piutang, perusahaan harus memiliki prosedur-prosedur yang tepat seperti:

- a. Memisahkan fungsi atau bagian yang menangani transaksi penjualan dan fungsi akuntansi pada piutang.
- b. Pegawai yang menangani akuntansi piutang harus dipisahkan dari fungsi penerimaan hasil penagihan piutang.
- c. Semua transaksi pemberian kredit, pemberian potongan, dan penghapusan piutang harus mendapat persetujuan dari yang berwenang.
- d. Piutang harus dicatat dalam buku tambahan piutang.
- e. Perusahaan membuat daftar piutang berdasarkan umurnya.

2.2.5 Piutang Usaha

Menurut (Martini Dwi, Veronica Siregar, 2012) Piutang merupakan klaim suatu perusahaan pada pihak lain.

Menurut (Sukrisno Goes, 2014) Piutang usaha merupakan piutang yang berasal dari penjualan barang dagangan atau jasa secara kredit maupun tunai.

Menurut (Mulyadi, 2017) Piutang merupakan klaim kepada pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang dapat diterima dalam jangka waktu satu tahun atau dalam satu siklus kegiatan perusahaan. Piutang yang timbul dari kegiatan entitas seperti penjualan atau memperoleh pendapatan disebut piutang dagang atau piutang usaha. Piutang dalam bentuk kontrak tertulis disebut wesel tagih. Wesel tagih biasanya berbunga dan memiliki jangka waktu relative panjang. Untuk perusahaan perbankan dan jasa keuangan, piutang berbentuk pinjaman yang diberikan berupa kredit. Menurut (Amalia, 2017) Adapun jenis-jenis piutang usaha sebagai berikut:

a. Piutang Usaha (*Account Receivable*)

Piutang usaha adalah suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan. Piutang timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Piutang ini biasanya diperkirakan akan tertagih dalam waktu

30-60 hari. Secara umum, jenis piutang ini merupakan piutang terbesar yang dimiliki perusahaan.

b. Wesel Tagih (*Notes Receivable*)

Wesel Tagih adalah surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang. Wesel tagih biasanya memiliki waktu tagih antara 60-90 hari atau lebih lama serta mewajibkan pihak yang berutang untuk membayar bunga. Wesel tagih dan piutang usaha yang disebabkan karena transaksi penjualan biasa disebut dengan piutang dagang (*trade account*).

c. Piutang Lain-Lain (*Other Receivable*)

Piutang lain-lain mencakup selain piutang dagang. Contohnya piutang bunga, piutang gaji, uang muka karyawan, dan restitusi pajak. Secara umum bukan berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, piutang jenis ini diklasifikasikan dan dilaporkan pada bagian yang secara terpisah di neraca.

Menurut (Ikatan, 2016) Piutang Usaha Merupakan jumlah yang akan dibayar oleh customer sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa. Piutang usaha umumnya diselesaikan dalam jangka pendek (kurang dari satu tahun atas dalam siklus operasi normal).

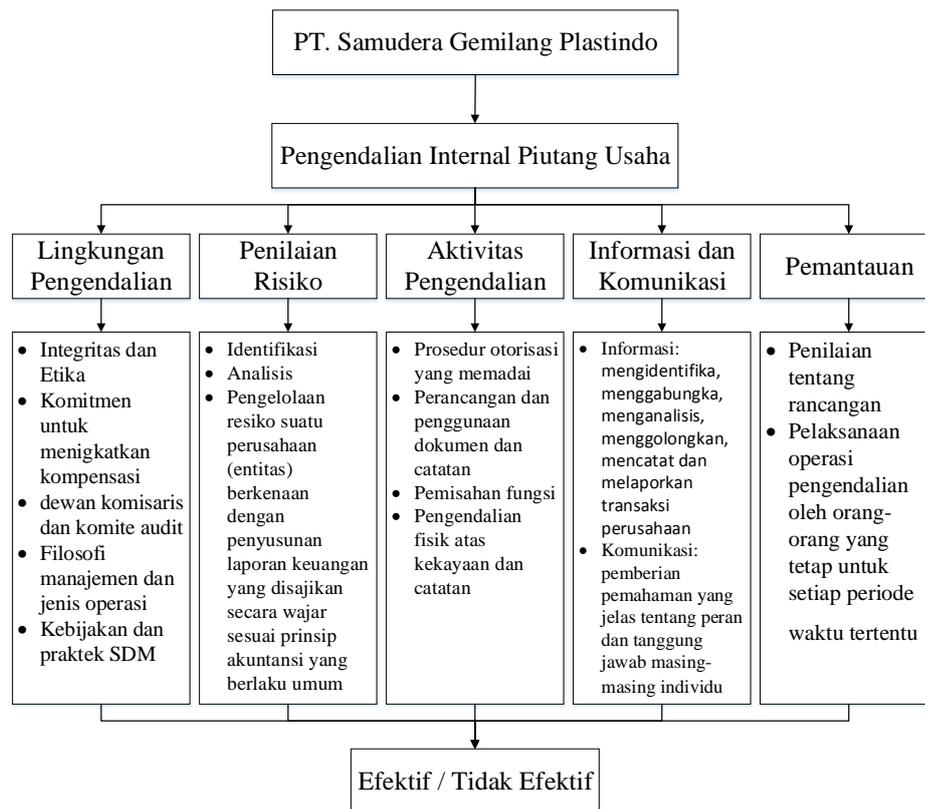
2.3 Kerangka Konseptual

Aktifitas PT. Samudera Gemilang Plastindo membuat dan menjual tas kantong plastic kepada pelanggan, baik melalui penjualan tunai maupun penjualan kredit. Didalam penjualan kredit akan menimbulkan piutang usaha. Piutang usaha harus berjalan lancar, yakni dapat ditagih sesuai dengan jangka waktunya. Agar hal ini dapat berjalan lancar, maka pengendalian internal terhadap piutang usaha harus dikelola dengan baik supaya tidak ada penunggakan pembayaran kredit dari pelanggan. Kerangka konseptual itu sendiri merupakan penetapan masalah yang diwujudkan pada suatu materi tentang relevansi dan aktualisasinya, dalam penelitian ini disusun perkiraan teoritis dari hasil-hasil yang akan dicapai sehingga akan mengantarkan pada kemudahan dalam pemecahan masalah.

Berikut Kerangka Konseptual yang menggambarkan pengelolaan piutang usaha melalui pengendalian internal terhadap piutang usaha. Sehingga diharapkan dengan adanya pengendalian internal dapat mengurangi piutang macet atau bermasalah.

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



Dari kerangka konseptual diatas dapat disimpulkan bahwa, seiring berjalannya usaha dalam memberikan kebijakan penjualan secara kredit, yang menimbulkan piutang usaha bagi perusahaan. Seperti yang ada di PT. Samudera Gemilang Plastindo perlu adanya pengendalian internal perusahaan untuk mengurangi piutang macet atau bermasalah. Pengendalian yang diawasi berawal dari, sebagai berikut:

- Lingkungan pengendalian, manajemen harus paham pentingnya akuntabilitas control.
- Penilaian risiko, merupakan proses pengidentifikasian dan analisa risiko yang berhubungan dengan pencapaian tujuan manajemen serta menentukan cara bagaimana risiko tersebut ditangani.

- c. Aktivitas pengendalian, merupakan kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memastikan dilaksanakannya kebijakan manajemen.
- d. Informasi dan komunikasi menjelaskan tentang kebutuhan terhadap pemerolehan informasi eksternal dan internal, potensi strategis dan sistem yang terintegrasi dan kebutuhan terhadap kualitas data.
- e. Pemantauan, proses yang menilai kualitas dari kinerja sistem pengendalian internal dari waktu ke waktu, yang dilakukan dengan melakukan aktivitas monitoring dan melakukan evaluasi secara terpisah.

Selanjutnya ketika pengendalian internal dilaksanakan dengan benar dan tegas maka kelancaran perusahaan dalam menghadapi piutang bisa berjalan dengan baik.